

OPERASI TANGKAP TANGAN KPK LIMA KEPALA DAERAH DALAM BINGKAI BERITASATU TV 2017

Siti Wulandari, Universitas Budi Luhur
Laksmi Rachmaria, Universitas Budi Luhur
Sitiwulandari880@gmail.com, 081212453761
Laksmi.ozil@gmail.com, 08179119408

Abstract

Every mass media have made the news himself in his sights. Making news in the mass media is a compilation of facts from the reality. The purpose of this research is to know how to Beritasatu TV Capture Operations news framing hands (OTT) top five KPK head area in the period June-September 2017. The method of this research is a qualitative analysis of the framing with Robert n. Entman. The results showed that the construction was done by Beritasatu TV through the preaching of the capture Operation hands (OTT) top five KPK head area as suspects belonging to the realm of law. By positioning Ridwan Mukti, Syafei Ahmad, Siti Masitha, OK Arya and Eddy Rumpoko as the head of the region as the main cause of the problem, then there are some other people involved in the case, as well as CCA OTT community as victims and the KPK as hero. Moral values are given Beritasatu TV that is by 1. KPK also seized a number of items of evidence one is money in fractions in rupiah. 2. the Bribe was allegedly in an effort to secure the village Fund corruption case perpetrated Syafei Ahmad. 3. OK Arya allegedly received bribes of up to 4.4 billion rupiah to smooth the project. 4. his Third allegedly involved give and take bribes amounting to 500 million dollars or 10% of the project value of 5.26 billion. 5. In addition to often receive deposits Masitha, head of Department of also receiving bribes from several projects in Tegal. KPK mentions that project funds for preparation for 2018 Walkot PILLS. In emphasizing problem solving with the CCA measures indiscriminately in the eradication of corruption in the upper area of the heads of the OTT should be supported. Theoretical advice is for other researchers that wish to conduct research using mass media (television) as a subject of research, researchers recommend and encourage other researchers to unlock the meaning or analyze the text of the news media in mass media using the method of analysis of framing Robert n. Entman. And practical advice that is given that any mass media has a background and a different goal, then it takes the mass media that can provide information in a professional manner.

Key Words: Framing, Media, OTT KPK Head Area

Pendahuluan

Korupsi adalah tingkah laku atau tindakan seorang pejabat publik yang menyimpang dari tugas-tugas publik formal untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau keuntungan bagi orang-orang tertentu yang berjaln kelindan dengan kepentingan kekerabatan Philip dalam Yamin (2016:37).

Hal yang paling mengidentikkan perilaku korupsi bagi masyarakat umum adalah penekanan pada penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk keuntungan pribadi.

Beberapa bentuk korupsi diantaranya adalah sebagai berikut : **a) Penyuapan (*bribery*)** mencakup tindakan memberi atau menerima suap, baik berupa uang maupun barang. **b) *Favouritism***, adalah mekanisme penyalahgunaan kekuasaan yang berimplikasi pada tindakan privatisasi sumber daya. **c)** Melanggar hukum yang berlaku dan merugikan negara.

Survei yang dilakukan *Transparency Internasional*, Indonesia menempati peringkat 96 dari 180 Negara di dunia pada Indeks Persepsi Korupsi 2017. Skor yang diperoleh Indonesia dalam daftar indeks tersebut adalah 37.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai media massa yakni fungsi kontrol sosial, Beritasatu TV meliput dan menayangkan berita seputar kasus korupsi.

Sepanjang Juni – September 2017 ini, ada lima kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) atas dugaan tindak pidana korupsi. Mereka kini berstatus tersangka KPK. Lima kepala daerah yang terjerat kasus korupsi dalam kurun waktu Juni sampai September 2017 ini adalah Ridwan Mukti (Gubernur Bengkulu), Achmad Syafii (Bupati Pamekasan), Siti Masitha (Wali Kota Tegal), OK Arya Zulkarnaen (Bupati Batubara) dan Eddy Rumpoko (Wali Kota Batubara).

Kasus korupsi pada kepala daerah yang dilakukan oleh KPK terdapat nilai berita (*news value*) tinggi, nilai berita yang terdapat pada

berita tersebut yaitu aktual (*timeliness*) berarti penetapan kelima kepala daerah sedang terjadi atau baru saja terjadi, *public figure* karena selaku kepala daerah, karena seorang *public figure* mempunyai daya tarik untuk menarik perhatian publik untuk tahu, dampak (*impact*), yang berarti adalah hal yang berdampak luas, kasus korupsi yang dilakukan oleh kelima kepala daerah ini memiliki dampak terhadap masyarakat luas, sehingga masyarakat perlu mengetahui perkembangan lebih lanjut, konflik (*conflict*) berita penetapan kelima kepala daerah sebagai tersangka mengandung konflik.

Beritasatu TV sebagai objek penelitian karena merupakan stasiun televisi berita berbayar pertama di Indonesia yang bersiaran dalam format visual Full High Definition (Full HD). Analisis *framing* Robert N. Entmen, dimana Entmen melihat framing dalam dua dimensi besar yaitu seleksi isu dan penekanaan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas atau isu itu sendiri, yang dimaksud penonjolan disini adalah proses dimana seorang wartawan mengolah informasi agar lebih menarik, berarti, pro dan kontra, berbeda , serta dapat mudah di ingat oleh khalayak.

Bedasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, “Bagaimana Beritasatu TV membingkai berita kasus korupsi Kepala Daerah yang terjadi sepanjang bulan Juni - September 2017”. Dan bertujuan untuk mengetahui cara Beritasatu TV membingkai berita OTT KPK terhadap lima kepala daerah.

Metode Penelitian

Menganalisis pembedingkaian pemberitaan OTT KPK Atas Lima Kepala Daerah di Beritasatu TV” (Episode Juni - September 2017). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis *framing*. Analisis *framing* adalah dapat digambarkan sebagai analisis untuk mengetahui bagaimana realitas (peristiwa, aktor, kelompok, atau apa saja) dibingkai oleh media. Pembedingkaian tersebut tentu saja dapat melihat realitas yang dibingkai oleh media dalam memberitakan

sebuah berita. *Framing* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *framing* model Robert N. Entman.

Entman menggambarkan konsepsi mengenai *framing* secara luas bagaimana peristiwa dimaknai dan ditandakan oleh wartawan. Berikut ini adalah perangkat *framing* menurut Entman:

Define Problem (Pendefinisian Masalah). Elemen ini merupakan *master frame* bingkai paling utama dalam sebuah peristiwa. Ia menekankan bagaimana peristiwa dipahami oleh wartawan. Ketika ada masalah atau peristiwa, peristiwa yang sama dapat dipahami secara berbeda. Maka menghasilkan realitas yang berbeda dalam pembentukannya walaupun satu pemberitaan atau permasalahan.

Diagnose Causes (Memperkirakan Penyebab) merupakan elemen *framing* untuk membingkai siapa yang dianggap sebagai aktor dari suatu peristiwa. Penyebab disini berarti apa (*what*), tetapi bisa juga berarti siapa (*who*). Bagaimana peristiwa dipahami, tentu saja menentukan apa dan siapa yang dianggap sebagai sumber masalah.

Make Moral Judgement (Membuat Pilihan Moral) adalah elemen *framing* yang dipakai untuk membenarkan/memberi argumentasi pada pendefinisian masalah yang sudah dibuat. Ketika masalah sudah didefinisikan, penyebab masalah ditentukan, dibutuhkan sebuah argumentasi yang kuat untuk mendukung gagasan tersebut. gagasan yang dikutip berhubungan dengan sesuatu yang familiar dan dikenal oleh khalayak.

Treatment Recommendation (Menekankan Penyelesaian). Elemen ini dipakai untuk menilai apa yang dikehendaki wartawan jalan apa yang dipilih untuk menyelesaikan masalah. Penyelesaian itu tentu saja sangat bergantung pada bagaimana peristiwa itu dilihat dan siapa yang dipandang sebagai penyebab masalah.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder

untuk mendukung dan memperkuat hasil penelitian.

a. Data Primer

Data primer didapat dari studi dokumentasi. Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan dalam hal ini teks berita Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.

Lexy J Moleong menjelaskan dua bentuk dokumen yang dapat dijadikan bahan studi dokumentasi:

1. Dokumen Pribadi
2. Dokumen Resmi

b. Data Sekunder

Data sekunder didapat dari studi kepustakaan atau *library research* adalah penelitian atau permasalahan dengan mencari keterangan-keterangan mengenai permasalahan tersebut dalam media apa saja seperti buku; majalah, dokumen-dokumen, dan sejumlah literatur lainnya. Data yang diperoleh berasal dari studi kepustakaan dan mempelajari buku-buku serta literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Studi kepustakaan ini hanya sebagai bahan referensi atau data sekunder yang mendukung dan memperkuat data primer penelitian.

Berikut adalah data sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian ini:

1. Wawancara
2. Studi Kepustakaan

Analisis pada subjek penelitian di media Beritasatu TV pada pemberitaan OTT KPK atas lima kepala daerah dan juga menganalisis objek penelitian yaitu dengan melakukan studi dokumentasi menganalisis video mengenai lima kepala daerah tersebut pada pemberitaan kasus korupsi kepala daerah periode Juni - September 2017. Lalu menganalisis penelitian ini dengan menggunakan metode analisis *framing* Robert N. Entman dengan pendekatan kualitatif. Robert N. Entman melihat *framing* dalam dua dimensi besar. Seleksi isu dan penekanan aspek-aspek tertentu dari realitas/isu.

Hasil Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana Beritasatu TV membingkai berita kasus korupsi kepala daerah yang terjadi sepanjang bulan Juni hingga September 2017. Peneliti menggunakan analisis *framing* untuk mengetahui pembingkai mengenai pemberitaan OTT KPK atas lima kepala daerah. Peneliti menggunakan analisis *framing* Robert N. Entman untuk mengetahui pembingkai mengenai pemberitaan OTT KPK atas lima kepala daerah pada stasiun televisi Beritasatu TV dalam memberitakan kasus korupsi kepala daerah Ridwan Mukti, Ahmad Syafei, Siti Masitha, OK Arya Zulkarnaen, dan Eddy Rumpoko.

Media bukan hanya memilih peristiwa dan menentukan sumber berita, melainkan juga berperan dalam mendefinisikan aktor dan peristiwa. Lewat bahasa yang dipakai, media dapat menyebut mahasiswa sebagai pahlawan, dapat juga menyebutnya sebagai perusuh (Eriyanto, 2011 : 27).

Pembahasan

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang biasanya dilakukan oleh para pejabat tinggi yang telah menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Dalam survei yang dilakukan *Transparency*

Internasional, Indonesia menempati peringkat 96 dari 180 Negara di dunia pada Indeks Persepsi Korupsi 2017. Skor yang diperoleh Indonesia dalam daftar indeks tersebut adalah 37.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan informan pada tanggal 5 April 2018 sebagai berikut, ia mengatakan bahwa berita korupsi mempunyai nilai berita yang tinggi karena merupakan kejahatan yang luar biasa dan Beritasatu juga concern terhadap korban dan efek dari korupsi itu sendiri. Berita tentang kasus korupsi biasanya ditempatkan disegmen satu, karena mempunyai magnet yang cukup besar. Dibandingkan kasus-kasus lainnya, kasus korupsi kepala daerah lebih menarik dan mempunyai nilai berita yang tinggi maka dari itu berita korupsi kepala daerah ditempatkan pada segmen satu di Beritasatu TV.

Dalam hal ini adanya berkepihakan antara Beritasatu TV dan KPK, karena Beritasatu TV berpegang pada KPK. Beritasatu TV menganggap bahwa KPK sebagai salah satu lembaga yang paling kredibel dalam memberantas korupsi dan Beritasatu TV mendukung KPK.

Sepanjang 2017 ini, ada lima kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) atas dugaan tindak pidana korupsi. Mereka kini berstatus tersangka KPK. Lima kepala daerah yang terjerat kasus korupsi dalam kurun waktu Juni sampai September 2017 ini adalah Ridwan Mukti (Gubernur Bengkulu), Achmad Syafii (Bupati Pamekasan), Siti Masitha (Wali Kota Tegal), OK Arya Zulkarnaen (Bupati Batubara) dan Eddy Rumpoko (Wali Kota Batubara).

Ridwan Mukti adalah Gubernur Bengkulu yang ditetapkan sebagai tersangka setelah ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK pada hari Rabu, 21 juni 2017, atas dugaan suap pada proyek peningkatan jalan TES-Muara Aman dan proyek peningkatan jalan Curug Air Dingin Kabupaten Rejang Lebong.

Selain Ridwan, istrinya Lily Martiani Maddari, Direktur PT Statika Mitra Sarana (PT SMS) Jhoni Wijaya, dan pengusaha Rico Dian

Sari juga menjadi tersangka kasus dugaan suap tersebut. PT SMS merupakan pemenang dua proyek jalan tersebut. Dalam kasus ini, Ridwan diduga mendapat commitment fee Rp 4,7 miliar dari proyek itu. Suap untuk Ridwan diberikan oleh Jhoni. Istri Ridwan ikut menjadi tersangka karena diduga sebagai perantara suap dari Jhoni. Uang suap itu diduga diberikan Jhoni melalui Rico.

Pada hari Rabu, 2 Agustus 2018 KPK menetapkan Bupati Pamekasan Achmad Syafii sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap untuk menghentikan penanganan kasus korupsi penyelewengan dana desa. Tidak hanya Achmad, KPK juga menetapkan empat orang lainnya sebagai tersangka yakni Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudi Indra Prasetya, Kepala Inspektorat Kabupaten Pamekasan, Sucipto Utomo, Kepala Desa Dasuk Agus Mulyadi, dan Kepala Bagian Administrasi Inspektorat Kabupaten Pamekasan Noer Solehhoddin.

Kasus ini berawal dari laporan sejumlah lembaga swadaya masyarakat soal dugaan penyimpangan anggaran dalam proyek infrastruktur senilai Rp 100 juta yang menggunakan dana desa. Anggota LSM melaporkan Kepala Desa Dassok, Agus Mulyadi, ke Kejaksaan Negeri Pamekasan. Laporan ini sempat ditindaklanjuti oleh Kejari Pamekasan dengan melakukan pengumpulan bahan dan keterangan.

Tim KPK menangkap Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno, bersama dengan dua orang lainnya yakni Ketua DPD Partai Nasdem Brebes Amir Mirza Hutagalung dan Wakil Direktur RSUD Kardinah Cahyo Supriadi pada hari Selasa, 29 Agustus 2017, ia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengelolaan dana jasa pelayanan RSUD Kardinah Kota Tegal Tahun 2017 dan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kota Tegal tahun 2017. Siti diduga menerima suap Rp 5,1 miliar. Uang suap itu diduga untuk ongkos politik Siti yang berniat mencalonkan diri sebagai wali kota Tegal untuk periode 2019-2024. Uang suap itu disebut dikumpulkan bersama Ketua DPD Partai Nasdem Brebes

Amir Mirza Hutagalung, dalam tujuh bulan terakhir.

Setelah Wali Kota Tegal, lalu KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dan menetapkan Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen sebagai tersangka. Dalam kasus ini, selain Bupati OK Arya, empat orang lainnya yakni Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Helman Herdady, seorang pemilik dealer mobil Sujendi Tarsono alias Ayen, dua orang kontraktor bernama Maringan Situmorang dan Syaiful Azhar, turut ditetapkan sebagai tersangka. OK Arya menjadi tersangka kasus suap pengerjaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara tahun 2017.

Yang terakhir terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK adalah Wali Kota Batu Eddy Rumpoko, ia ditangkap oleh tim KPK di rumah dinas. Eddy ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada hari Minggu, 18 September 2017. Ia menjadi tersangka dugaan suap proyek belanja modal dan mesin pengadaan meubelair di Pemkot Batu tahun anggaran 2017 senilai Rp 5,26 miliar, yang dimenangkan PT Dailbana Prima. Selain Eddy, KPK menetapkan dua orang lainnya sebagai tersangka yakni Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Pemkot Batu Edi Setyawan dan pengusaha bernama FilipusDjap.

Peneliti melakukan analisis pada beberapa tayangan berita yang ditayangkan oleh Beritasatu TV dan juga melakukan wawancara pada media massa Beritasatu TV mengenai pemberitaan OTT KPK pada lima kepala daerah dimana dalam pemberitaan tersebut terjadi pada waktu yang berdekatan.

Beritasatu TV melakukan konstruksi terhadap pemberitaan OTT KPK lima kepala daerah, berdasarkan teori Robert N. Entman peneliti mendapatkan hasil dari media massa Beritasatu TV.

Media mengkonstruksi pemberitaan mengenai OTT KPK lima kepala daerah yang melibatkan Ridwan Mukti, Ahmad Syafei, Siti Masitha, OK Arya Zulkarnaen, Eddy Rumpoko dan beberapa orang lainnya yaitu tersangka

selaku Kepala Daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam kasus korupsi kelima kepala daerah tersebut, tayangan di Beritasatu TV menonjolkan pemberitaan terhadap penetapan tersangka kepada kelima kepala daerah dan beberapa orang lainnya dan disitanya barang bukti yang didapatkan oleh KPK.

Beritasatu TV membingkai dan mengkonstruksi kasus korupsi kelima kepala daerah ini berdasarkan *character graphic* (CG) yang ditampilkan dalam tayangan Berita di Beritasatu TV. Yang menjadi tayangan Beritasatu TV dalam mengkonstruksi kasus korupsi kelima kepala daerah adalah cara penekanan atau penonjolan kata yang ditayangkan oleh Beritasatu TV. Dan beritasatu TV memandang masalah ini kedalam masalah hukum dengan memposisikan Ridwan Mukti, Ahmad Syafii, Siti Masithha, OK Arya Zulkarnaen, dan Eddy Rumpoko sebagai penyebab masalah, dan menjadikan kelima kepala daerah tersebut menjadi tersangka sebagai penyelesaian masalah dalam pemberitaan yang diberitakan pada Beritasatu TV.

Simpulan dan Saran

Bedasarkan penelitian dan pembahasan yang bertujuan untuk memenuhi konstruksi berita di media massa Beritasatu TV terkait pemberitaan OTT KPK atas lima kepala daerah periode Juni – September 2017, menggunakan analisis *framing* Robert N. Entman sebagai alat untuk menganalisis objek penelitian berupa tayangan dan naskah berita Beritasatu TV terkait pemberitaan OTT KPK atas lima kepala daerah, peneliti menyimpulkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab sebelumnya.

Beritasatu TV memandang masalah ini kedalam masalah Hukum. Dengan memposisikan Ridwan Mukti, Ahmad Syafei, Siti Masitha, OK Arya Zulkarnaen, dan Eddy Rumpoko sebagai penyebab masalah. Sedangkan, masyarakat diposisikan sebagai korban, dan pihak KPK diposisikan sebagai pahlawan. Masyarakat adalah korban dari para koruptor yang telah memakan atau mengambil hak uang rakyat, uang yang seharusnya dapat

digunakan untuk kepentingan umum malah berbanding terbalik digunakan untuk kepentingan pribadi pada pejabat daerah yang korupsi. Dan menjadikan kelima kepala daerah sebagai tersangka sebagai penyelesaian masalah.

Melalui bahasa jurnalistik yang disampaikan Beritasatu TV tentang korupsi kepala daerah untuk menyampaikan pesan dan menekankan masalah agar masyarakat dapat lebih terpengaruh oleh sajian berita yang diberikan oleh Beritasatu TV sehingga masyarakat memiliki citra positif terhadap KPK.

Dalam mengkonstruksi berita, Beritasatu TV mengkonstruksi kedalam masalah hukum, karena terdapat beberapa penonjolan aspek yang terdapat pada judul berita sehingga lebih menarik, dari sisi gambar grafic, dan isi naskah berita.

Dalam wawancara yang lakukan dengan informan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa adanya kerjasama yang dilakukan antara Beritasatu TV dan KPK dengan jaringan internet *first media* yang dipakai di Gedung KPK. Bukan hanya jaringan internet saja namun ada juga alat yang sudah ditaruh oleh tim Beritasatu TV berupa kotak kecil yang diletakan di beberapa titik penting di Jakarta. Hal ini yang membuat tim Beritasatu TV mudah dalam mendapatkan berita dan bersiaran secara langsung.

Selain itu peneliti dapat menyimpulkan bahwa adanya keberpihakan Beritasatu TV kepada KPK karena Beritasatu TV yakin atau berpegang pada KPK yang sebagai salah satu lembaga paling kredibel dalam memberantas korupsi dan Beritasatu TV ikut mendukung KPK .

5.2 Saran

Bedasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka terdapat saran yang diberikan peneliti, yaitu:

5.2.1 Saran Teoritis

1. Bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian menggunakan media massa (televisi) sebagai subjek penelitian, peneliti menyarankan dan menganjurkan peneliti lain untuk membuka makna atau menganalisa teks berita pada media massa menggunakan metode analisis *framing* Robert N. Entman.
2. Penelitian yang menggunakan analisis *framing* Robert N. Entman agar memilih pemberitaan yang sedang ramai dibicarakan dan diperdebatkan agar lebih melihat sisi-sisi mana saja yang ditonjolkan dan ditenggelamkan dalam pemberitaan tersebut.

5.2.2 Saran Praktis

1. Mengingat bahwa setiap media massa mempunyai latar belakang dan tujuan yang berbeda-beda, maka dibutuhkan media massa yang dapat memberikan informasi secara profesional.

Masyarakat harus bisa memilah-milah media massa yang dapat lebih dipercaya dalam memuat pemberitaannya, sehingga masyarakat tidak

DAFTAR PUSTAKA

Eriyanto. 2011. *Analisis Framing*. Yogyakarta: LkiS Printing Cemerlang

Moleong. J Lexy. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Yamin, Moh. 2016. *Pendidikan Anti Korupsi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Sumber Lain :

1. Sumber Internet :

www.kajianpustaka.com/2013/08/pengertian-model-bentuk-jenis-korupsi.html?m=1

2. Sumber Skripsi :

Andraini, Reni. 2017. "Konstruksi Berita Penetapan Dimas Kanjeng Taat Pribadi Sebagai

Tersangka (Analisis *Framing* Robert N. Entman Pada Tribunnews.com dan Tempo.co Periode 29-30 September 2016)". Universitas Budi Luhur: Tugas Akhir Tidak Diterbitkan